

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, RATA-RATA LAMA SEKOLAH,  
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Susi Husila  
Ekonomi Pembangunan, Fakultas ekonomi  
Universitas Negeri Makassar  
[Susihusila80@gmail.com](mailto:Susihusila80@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Susi Husila, 2019. Analysis of the Effects of Inflation, Average Length of School, Economic Growth on Unemployment in South Sulawesi Province. This reasearch is guided by **Dr. Sri Astuty and Muhammad Imam Ma'ruf**. study program of economic development, Faculty of Economics, Makassar State University.*

*The purpose of this study is to analyze the effect of inflation, the average length of schooling, economic growth, and unemployment in the province of South Sulawesi. This study uses secondary data obtained from the Central Sulawesi Provincial Statistics Agency which consists of data on unemployment, inflation, average length of school, and economic growth in South Sulawesi Province 2003-2017. Data analysis using multiple linear regression analysis Software E-views 10. The results of this study indicate that inflation has no effect on unemployment in the province of South Sulawesi, the average length of time of schooling affect unemployment in the province of South Sulawesi and economic growth has an affect on unemployment in the province of South Sulawesi.*

*Keywords : Unemployment, Inflation, Average School Length, Economic Growth.*

**ABSTRAK**

Susi Husila, 2019. Analisis Pengaruh Inflasi, Rata-Rata lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi ini dibimbing oleh Dr. **Sri Astuty dan Muhammad Imam Ma'ruf**. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari data pengangguran, inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2017. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda *Software E-views 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran

di Provinsi Sulawesi Selatan, rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi selatan.

Kata Kunci: Pengangguran, Inflasi, Rata-Rata lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mengentaskan kemiskinan, menjaga kestabilan harga dengan memperhatikan tingkat inflasi, menjaga keseimbangan pembayaran, memperhatikan neraca perdagangan, pendistribusian pendapatan yang adil dan merata dan mengatasi masalah pengangguran (Todaro dan Smith, 2011).

Setiap negara khususnya negara berkembang mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan untuk

mengendalikan tingkat pengangguran.

Keadaan di negara berkembang beberapa tahun ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan tidak mampu untuk menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang ada. Hal itu terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah karena dapat memengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis (Mankiw, 2006).

Berdasarkan data tentang pengangguran, tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 berada pada posisi kedua di Pulau Sulawesi. Tingkat pengangguran tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu 7,18%; dan diikuti Provinsi Sulawesi Selatan 5,61%; Gorontalo 4,28%; Sulawesi Tengah 3,81%; Sulawesi Tenggara 3,30%; dan Provinsi dengan pengangguran terendah yaitu 3,21% untuk Provinsi Sulawesi Barat (Badan Pusat Statistik, 2018).

Tingkat pengangguran yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah di Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan terus berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Perkembangan pengangguran yang semakin cepat

dengan jumlah yang besar dapat disebabkan oleh banyak hal, beberapa diantaranya yaitu inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Inflasi terjadi karena adanya tarikan permintaan secara tidak langsung dan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan akan suatu barang meningkat, maka harga barang itu sendiri akan meningkat dikarenakan terbatasnya ketersediaan barang tersebut. Pada kondisi tersebut produsen berusaha memenuhi permintaan pasar dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja (Latumaerissa, 2015).

Hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran diperkenalkan oleh A.W. Philips, yang menggambarkan adanya hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Philips memperlihatkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung disertai oleh inflasi yang tinggi dan tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah (Samuelson dan Nordhaus 1985 *dalam* Doemaria, 2011).

Selain inflasi, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pengangguran. Pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir seseorang, karena di era global seperti ini persaingan semakin ketat diiringi dengan kemajuan

teknologi yang semakin tinggi. Upaya mencerdaskan bangsa ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003).

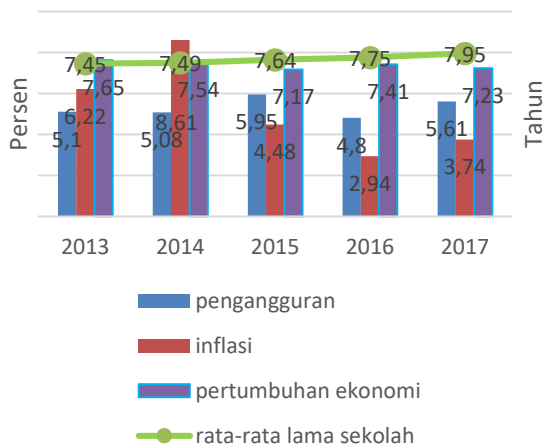
Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti

waktu, tenaga kerja dan biaya tetap sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan jauh dari efisien, dengan pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani (Bado, Dkk 2017).

Di sisi lain, yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Jadi, pertumbuhan

ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah ekonomi dalam jangka panjang (Jhingan, 2013).

Gambaran umum mengenai inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Perkembangan Inflasi, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2017**  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2018

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2017 tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi, sedangkan pada tingkat rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami tren positif atau mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 0,5 persen. Pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2017 pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,51 persen, pengangguran paling tinggi mencapai 5,95 persen pada tahun 2015 dan paling rendah 4,80 persen pada tahun 2016. Dalam periode yang sama

inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 adapun penurunannya lebih rendah dari inflasi nasional dan memberi gambaran bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Adapun penurunan inflasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 2,48 perse. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan dan kembali naik menjadi 7,41 persen pada tahun 2016 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017. Adapun penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,42 persen.

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 bisa diketahui bahwa inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kondisi yang stabil, rata-rata lama sekolah juga terus mengalami peningkatan, dan pertumbuhan ekonomi juga cukup baik. Peningkatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada kenyataannya tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi

Selatan terus bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dan kestabilan dari inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menjadi peluang yang besar dalam mengatasi tingkat pengangguran.

Sehubungan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan”.

## **Landasan Teori dan Konsep**

### **1. Pengangguran**

Menurut Teori Klasik ada dua alasan yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu, (Murni, 2016) :

a. Kekuatan tingkat upah, serikat-serikat buruh tidak bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah, maka permintaan terhadap tenaga buruh akan meningkat, sehingga pengangguran dapat diturunkan.

b. Kekuatan yang kedua muncul dari pihak pengusaha besar, yang meningkat kekuatan monopolinya, sehingga mereka lebih leluasa menentukan tingkat harga pasar.

Menurut BPS dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikolog. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka

tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pengangguran dapat diamati melalui dua pendekatan (Murni, 2016) mengatakan bahwa :

a. Pendekatan Angkatan Kerja

Besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan antara jumlah orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran

$$= \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja

Untuk menentukan besar kecilnya tingkat pengangguran yang didasarkan pada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja antara lain :

1) Pengangguran penuh yaitu sejumlah orang yang benar-benar tidak bekerja atau tidak dimanfaatkan sama sekali.

2) Setengah menganggur yaitu sejumlah orang yang bekerja belum dimanfaatkan secara penuh. Mereka mungkin hanya bekerja satu sampai empat hari seminggu atau satu hingga empat jam sehari.

Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya (McEachern, 2000) :

a. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya

1) Pengangguran normal

Pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperolehnya, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam proses mencari kerja baru untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran.

2) Pengangguran struktural

Terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga



kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

### 3) Pengangguran teknologi

Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin. Misalnya, racun lalang dan rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang dan memotong rumput. Sedangkan hasil pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja manusia.

b. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya :

1) Pengangguran musiman adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai

contoh, petani yang menanti musim hujan.

2) Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja.

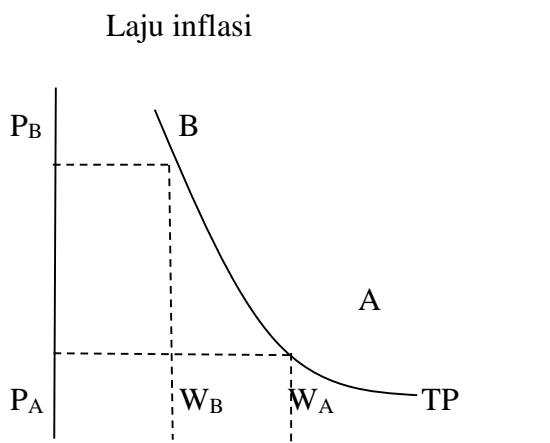
3) Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.

## 1. Teori Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus selama dalam periode tersebut. A.W. Philips menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan

tingginya tingkat harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja.

Hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran diperlihatkan oleh kurva philips pada gambar yang berbentuk parabola membuka keatas. Pada sumbu horizontal diperlihatkan besarnya tingkat pengangguran, sedangkan pada sumbu vertikal adalah tingkat inflasi.



**Gambar 2.1**  
**Kurva Philips**

**Sumber : Samuelson dan Nordhaus, 1996**

Apabila pemerintah menginginkan untuk mencapai tingkat inflasi rendah ( $P_A$ ) maka konsekuensi yang akan diterima adalah semakin meningkatnya tingkat

pengangguran sebesar  $W_A$  dan begitupun sebaliknya. Philips menerangkan bahwa tingkat inflasi rendah disebabkan dampak pengurangan konsumsi yang selanjutnya berdampak pula terhadap pengurangan permintaan. Kondisi seperti ini kemudian akan menyebabkan berkurangnya kuantitas output atau berkurangnya penawaran.

Di sini pihak produsen akan mengurangi penggunaan sejumlah tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan semakin meningkat menjadi  $W_A$ . Kondisi sebaliknya jika tingkat pengangguran dikurangi menjadi  $W_B$ , maka tingkat inflasi akan meningkat menjadi  $P_B$ . Meningkatnya inflasi ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan yang selanjutnya mendorong kuantitas penawaran juga mengalami peningkatan. Kondisi seperti ini kemudian akan mendorong produsen untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran berkurang menjadi  $W_B$ .

Secara garis besar tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing

menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi (Latumaerissa, 2015) :

a. Teori kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Misalnya bila terjadi kegagalan panen menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan beras akan berhenti dengan sendirinya. Kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai harga-harga di masa akan datang.

b. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan

bagian yang lebih besar daripada yang disediakan oleh masyarakat. Proses perebutan ini diterjemahkan menjadi keadaan permintaan masyarakat terhadap barang-barang akan selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya *inflationary gap*).

c. Teori Struktural

Menurut teori ini, inflasi disebabkan karena ketidak elastisan penerimaan ekspor. Hasil ekspor meningkat, namun lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Peningkatan hasil ekspor yang lambat antara lain disebabkan karena harga barang yang diekspor kurang menguntungkan dibandingkan dengan kebutuhan barang-barang impor yang harus dibayar. Ketidak elastisan *supply* produksi bahan makanan. Terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan produksi bahan makanan dengan jumlah penduduk, sehingga mengakibatkan kelonjakan kenaikan

harga bahan makanan. Hal ini dapat menimbulkan tuntutan kenaikan upah dari kalangan buruh/pegawai tetap akibat kenaikan biaya hidup. Kenaikan upah selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan mendorong terjadinya inflasi.

A.P. Lerner *dalam* Latumaerisa (2015) mengatakan inflasi adalah keadaan yang menunjukkan terjadinya kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. G.Cowt Hrey *dalam* Latumaerisa (2015) berpendapat inflasi adalah suatu keadaan dari nilai uang turun terus-menerus dan harga naik terus, sedangkan Hawtry *dalam* Latumaerisa (2015) berpendapat inflasi adalah suatu keadaan karena terlalu banyak uang beredar, jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan terjadi peningkatan harga barang serta jasa secara umum dan terus-menerus (Latumaerissa, 2015). Adapun jenis-jenis inflasi yaitu :

a. Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya inflasi digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu adalah sebagai berikut :

1) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun) ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif.

2) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun) ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.

3) Inflasi berat (antara 30-100% setahun) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.

4) Hiperinflasi (lebih dari 10 % setahun) inflasi ini paling parah

akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang.

b. Berdasarkan sebabnya

Berdasarkan menurut sebabnya dapat digolongkan menjadi 2, adalah sebagai berikut :

1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-pull Inflation*), Inflasi tarikan permintaan bermula dari adanya kenaikan permintaan total yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran agregat, yang menunjukkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikkan harga dapat juga

menaikkan hasil produksi. Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga yang sering disebut inflasi.

2) Inflasi Dorongan Biaya (*Cost-push Inflation*), Inflasi dorongan biaya menekankan pada terjadinya pergeseran kurva *aggregate supply* sebagai penyebab utama inflasi yang merupakan inflasi yang terjadi akibat dari adanya kenaikan biaya produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa ke pasar. Kenaikan biaya produksi dapat timbul dikarenakan beberapa faktor seperti perjuangan serikat buruh yang berhasil menuntut kenaikan upah, harga barang dalam negeri, dan harga barang impor yang

belum sanggup diproduksi di dalam negeri.

## 2. Teori Human Capital

Ada tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pengangguran, yaitu Teori Modal Manusia, Teori Alokasi dan Teori Reproduksi Strata Sosial. Teori Modal Manusia menjelaskan bahwa proses pendidikan memiliki pengaruh positif pada pengangguran. Seseorang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dapat diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, yang dapat memengaruhi keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang ikut meningkat, sehingga semakin tinggi pula kemampuannya untuk bekerja. Dengan demikian, pendidikan merupakan investasi masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran (Becker 1964 *dalam* Safitri, 2018).

Pada tahun 1970-an, teori ini mendapat kritikan tajam dari teori alokasi, tingkat pendidikan tidak selalu sesuai

dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan bahwa dalam ekonomi moderen sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.

Dengan demikian orang yang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (sifatnya non formal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan Teori Alokasi atau Persaingan Status yang mendapat dukungan dari (Lester Thurow 1974 *dalam* Safitri, 2018), (John Meyer 1977 *dalam* Safitri, 2018) dan (Randall Collins 1979 *dalam* Safitri, 2018).

Teori Persaingan Status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya

mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Kelas atau Strata Sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan, dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas

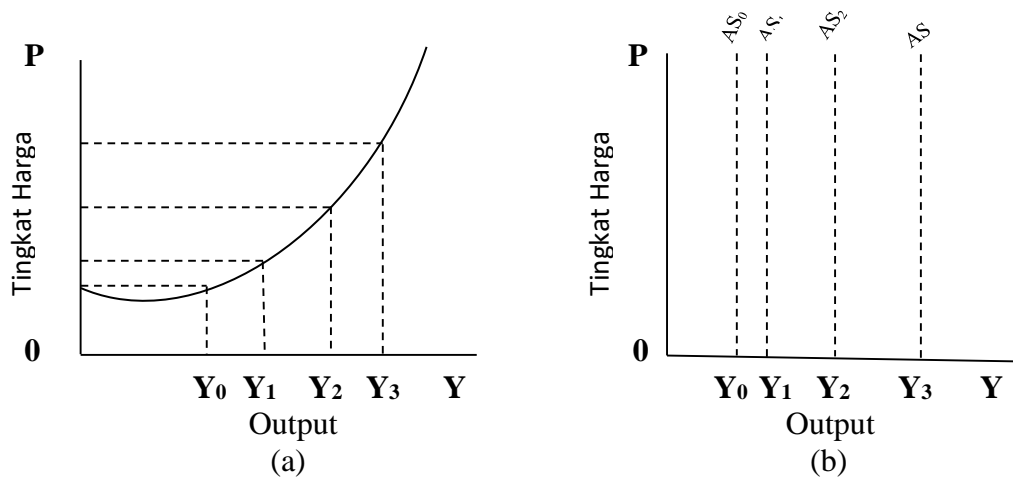
menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini didukung antara lain oleh (Samuel Bowles dan Herbert Gintis 1976 *dalam* Safitri, 2018).

Untuk melihat teori yang relevan sesuai dengan keadaan sekarang ini dapat dilihat pada akhir tahun 1980-an dengan pionirnya seperti Paul Romer dan Robert Lucas yang menekankan pada aspek pembangunan modal manusia. Menurut (Romer 1991 *dalam* Safitri, 2018), modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Karena modal manusia, seperti dikemukakan dalam awal tulisan ini, memiliki hubungan positif dengan pengangguran, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas.

### 3. Teori Penawaran Agregat Klasik dan Keynes

Kurva Penawaran Agregat Klasik adalah vertikal, didasarkan pada asumsi bahwa pasar tenaga kerja berada pada tingkat keseimbangan dengan angkatan kerja berada pada kondisi *full employment*. Dengan tingkat harga yang tinggi dengan jumlah barang yang tetap, sehingga untuk mengimbangi tingkat harga yang tinggi maka dibutuhkan tenaga kerja untuk menambah jumlah output yang akan diproduksi karena produsen yang menghadapi permintaan tinggi dapat

meningkatkan harga produknya dan faktor-faktor produksi siap untuk digunakan salah satunya tenaga kerja. Kurva Penawaran Agregat Keynes adalah horizontal menggambarkan bahwa perusahaan akan menawarkan Kuantitas barang berapapun yang diminta pada tingkat harga yang berlaku karena ini dilandaskan pada pemikiran bahwa adanya pengangguran sehingga perusahaan dapat menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja dengan melihat tingkat upah yang berlaku (Dornbusch, Dkk, 2008).



**Gambar 2.2.**  
**Kurva Penawaran Agregat Keynes (a) dan Klasik (b)**  
**Sumber : Dornbusch, Dkk 2008**



## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2003 – 2017, maka penelitian menggunakan alat analisis regresi berganda. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan *Software E-Views 10*. Berdasarkan hipotesis maka didapat bahwa variabel inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran, sehingga bentuk model persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut :

$$PG = \beta_0 + \beta_1 IF_t + \beta_2 RLS_t + \beta_3 PE_t + e$$

Keterangan :

pengguna data. Adapun data dalam penelitian ini adalah pengangguran, inflasi, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang diambil berdasarkan kurun waktu 2003 - 2017. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

PG : Pengangguran (%)

$\beta_0$  : *Intersep*/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ : Koefisien regresi variabel bebas

IF : Infasi (%)

RLS : Rata-Rata lama sekolah (Tahun)

PE : Pertumbuhan ekonomi (%)

E : Kesalahan pengganggu  
(*disturbance error*)

T : *Time series*

## Hasil Penelitian

Berdasarkan uji yang telah dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Inflasi (IF), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap variabel terikat yaitu pengangguran (PG) dengan menggunakan model regresi berganda dan uji asumsi klasik, koefisien

determinan, dan uji statistik. dengan menggunakan *Software E-Views 10*. Hasil

penelitian tentang analisis pengaruh inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Variabel	T.H.	Koefisien	t <sub>hitung</sub>	Sig
Inflasi (IF)	-	0,1288 <sup>ns</sup>	1,2258	0,2458
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	-	-7,7197*	-5,3201	0,0002
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	-	-2,0754*	-4,4262	0,0010
Konstanta				79,6079
Adjusted R <sup>2</sup>				0,90919
F <sub>hitung</sub>				47,7255
DW				1,2818
N				15

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Menggunakan *Eviews 10***

**Sumber : Hasil pengujian menggunakan *Eviews 10***

Keterangan :

- \* : Signifikan pada tingkat kesalahan 1 persen (0,01)
- ns : Tidak signifikan pada taraf yang ditentukan
- T.H : Tanda Harapan
- DW : *Durbin Watson*
- N : Total Observasi

Berdasarkan hasil estimasi model pengangguran dengan menggunakan *Eviews 10*, maka persamaan model dapat dilihat pada persamaan 4.1.

$$PG = 79,6079 + 0,1288 IF_t^2 + 7,7197 RLS_t + 2,0754 PE_t^2 + e$$

Untuk melihat multikolinearitas dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi

antar variabel, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

	INF	RLS	PE
INF	1	-0,31	-0,03
RLS	-0,31	1	0,60
PE	-0,03	0,60	1

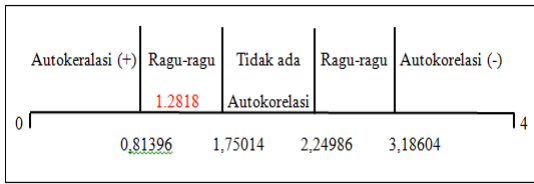
**Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas antar Variabel Bebas**

**Sumber : Output *Eviews 10***

Menurut Gujarati (2006), multikolinearitas terjadi apabila koefisien korelasi > 0,80 dan sebaliknya jika koefisien korelasi < 0,80 maka model bebas dari masalah multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 4.2 variabel inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson (DW)* dengan nilai DW adalah 1,2818, nilai d<sub>l</sub> = 0,81396 dan d<sub>u</sub> = 1,75014..

$$(4.1)$$



**Gambar 4.5 Uji Autokorelasi dengan Tabel Durbin-Watson**  
**Sumber : Hasil Pengujian dengan menggunakan Eviews 10**

Gambar 4.5 menjelaskan bahwa  $d_l < DW < d_u$  atau nilai DW berada di antara  $d_l$  dan  $d_u$  yang berarti hasil pengujian tidak dapat disimpulkan atau berada di daerah ragu-ragu, maka pengujian ini digunakan analisis lain yaitu metode *Breush-Godfrey Serial Correlation LM test*. Hasil uji autokorelasi dengan metode *Breush-Godfrey Serial Correlation LM test* dengan nilai *Prob Chi Square* (2) = 0,1363 yang lebih besar dari alpha yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model yang digunakan pada penelitian ini.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan, digunakan ukuran ketepatan model koefisien determinasi

*adjusted R<sup>2</sup>*. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan *Eviews 10*, koefisien determinasi *adjusted R<sup>2</sup>* yang diperoleh sebesar 90,91. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2003-2017 sebesar 90,91 persen, maka kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat sangat kuat dan sisanya sebesar 9,09 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 47,7255, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,29, karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , hal tersebut dapat diartikan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel-variabel bebas (inflasi, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pengangguran). Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap

variabel terikatnya. berpengaruh terhadap variabel pengangguran. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki nilai probabilitas  $0,2458 >$  taraf signifikan  $0,01$  berarti secara parsial variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel pengangguran. Variabel rata-rata lama sekolah memiliki nilai probabilitas  $0,0002 <$  taraf signifikan  $0,01$  berarti secara parsial variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap variabel pengangguran. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas  $0,0010 <$  taraf signifikan  $0,01$  berarti secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap variabel pengangguran.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh variabel inflasi, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dengan mengaitkan terhadap teori-teori ekonomi yang

melandasi dan penelitian yang terkait sebelumnya.

### **Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel inflasi adalah  $0,1288$  persen dengan nilai probabilitas inflasi  $0,2458 >$   $0,01$ , sehingga variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnayanti dan Ritonga (2017) bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasmusi dan Dewi (2012) dan Murniasih, dkk (2014), menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak signifikan terhadap pengangguran.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Teori Kurva Philips, yaitu apabila pemerintah menginginkan untuk mencapai tingkat inflasi rendah maka konsekuensi yang akan diterima adalah semakin

meningkatnya tingkat pengangguran dan begitupun sebaliknya. Philips menerangkan bahwa tingkat inflasi yang rendah disebabkan oleh dampak pengurangan konsumsi yang selanjutnya berdampak pula terhadap pengurangan permintaan.

Hubungan inflasi dan pengangguran yang positif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa fenomena inflasi lebih cenderung merupakan fenomena *cost push inflation* atau dorongan penawaran.

Inflasi dari sisi penawaran terjadi apabila penurunan penawaran terhadap barang-barang dan jasa karena adanya kenaikan dalam biaya produksi yang diakibatkan oleh keinginan meningkatkan tingkat upah riil pekerja yang diakibatkan oleh adanya ekspektasi inflasi di masa depan akan meningkat. Peningkatan upah akan membuat produsen untuk menurunkan tingkat produksinya di bawah tingkat produksi optimal sehingga akan meningkatkan harga dan akan meningkatkan tingkat pengangguran.

Dari sisi penawaran perlunya kebijakan untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran yaitu pemerintah perlu memperhatikan kebijakan dalam rangka penurunan pajak karena dengan turunnya pajak akan dapat menarik investasi sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan dalam produksi, dengan bertambahnya produksi maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja sehingga masalah pengangguran dapat diatasi dan inflasi akan dapat ditekan

#### **Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel rata-rata lama sekolah sebesar - 7,7197 persen, artinya jika terjadi kenaikan rata-rata lama sekolah 1 persen akan menyebabkan penurunan pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,7179 persen. Nilai probabilitas rata-rata lama sekolah  $0,0002 < 0,01$ , sehingga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian

ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnayanti dan Ritonga (2017) dan Hartanto dan Masjkuri (2017), menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Secara teoritis hal ini sejalan dengan Teori *Human Capital*, yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pengangguran, yaitu Teori Alokasi atau Persaingan Status. Pada tahun 1970-an, Teori Modal Manusia mendapat kritikan tajam dari Teori Alokasi, tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.

Dengan demikian orang yang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (sifatnya non formal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Lester Thurow (1974), John Meyer (1977) dan Randall Collins (1979)

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -2,0754 persen, artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan pengangguran sebesar 2,0754 persen di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi  $0,0010 < 0,01$ , sehingga pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Affandi

(2016), menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Penawaran Agregat Klasik adalah dengan permintaan yang tinggi terhadap output maka perusahaan akan siap menggunakan faktor-faktor produksi (tenaga kerja dan modal) untuk dapat mengimbangi permintaan. Berdasarkan teori penawaran agregat Keynes bahwa perusahaan akan menawarkan berapapun jumlah barang yang diminta pada tingkat harga yang berlaku karena pemikiran yang melandasi kurva penawaran agregat Keynes adalah karena adanya pengangguran sehingga dapat memperoleh sebanyak mungkin tenaga kerja pada tingkat upah yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2004. Sulawesi Selatan Dalam Angka : Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan : Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Sulawesi Selatan Dalam Angka : Makassar.
- Bank Indonesia. 2010. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bank Indonesia. 2011. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bank Indonesia. 2012. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bado, B, Hasbiah, S, Hasan, M, Alam, S. 2017. *Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi*.
- Boediono, 2001. *Ekonomi Makro* Edisi 4. Yogyakarta : BFFE
- Doemaria. R. O. 2011. *Analisis Hubungan Tingkat Inflasi dan Pengangguran di Indonesia (Pendekatan Kurva Philips)*. Skripsi. (tidak dipublikasikan) Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Dornbush, R, Fischer, S, Startz, R. 2008. *Makroekonomi* Edisi 10. Terjemahan oleh Roy Indra Mirazudin. PT. Media Global Edukasi.
- Gujarati, N. D. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga
- Hartanto, B.T, dan Masjkuri, U.S. 2017. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan.
- Hastarini, D. A. 2005. *Investasi dan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 2. No.1.
- Imran, Dkk. Laporan Tahunan. 2015. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Iskandar, A. 2016. *Persistensi Inflasi Regional di Sulawesi Selatan*. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.
- Isnayanti, dan Ritonga A. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014*.
- Jhingan, M. L. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. B, dan Affandi M. 2016. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi Terhadap Pengangguran di Kabupaten Gresik*. Jurnal ilmiah. Universitas Briwijaya, Malang.
- Latumaerissa, J. R. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Maharani, Y. 2012. *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi (tidak dipublikasikan) Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Mankiw, N. G. 2006. *Edisi Keenam Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- McEachern, W. A. 2000. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* (terjemahan Sigit Triandaru). Jakarta : Salemba Empat.
- Murni, A. 2016. *Edisi Revisi Ekonomika Makro*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Murniasih, K. N, Dunia K, Meitriana A.M. 2014. *Pengaruh Nilai PDRB, Tingkat Upah, dan Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2003-2012*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. No.1.
- Poyoh, A, Kapantow, M. H. G, Mandei, R. J. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara*. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat. Volume 13. No 1A.
- Rahim, Abd. 2012. *Model Ekonometrika Perikanan Tangkap*. Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Rusmusi dan Dewi, S.A. 2012. *Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap pengangguran di Indonesia Periode 2001-2010*. Eko-Regional volume 7.
- Safitri, D. 2018. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Samuelson, P. A, dan Nordhaus W. D. 1996. *Edisi Keempatbelas Makro-Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Sukirno, S. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Andi Offset.
- Todaro, M. P, dan Smith, S. C. 2011. *Edisi Kesebelas Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.